



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADANG PANJANG
(LKj IP)**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018**

IKHTISAR EKSEKUTIF

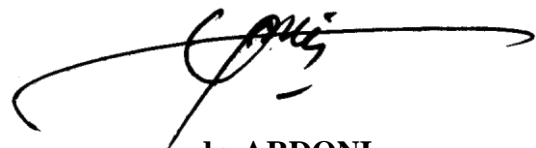
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) RSUD Kota Padang Panjang ini adalah untuk menjabarkan pengukuran kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja yang terukur. Sebagai Pedoman Penyusunan LKj IP Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah bahwa setiap Kab/Kota wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah anggaran tahun berakhir.

Maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan masing-masing pada setiap akhir tahunnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 s/d 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

Rumah sakit adalah institusi kesehatan yang padat modal, padat pakar dan padat teknologi. Kinerja Rumah Sakit merupakan suatu dimensi utama dari mutu pelayanan rumah sakit. Pencapaian kinerja RSUD tahun 2018 merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh sesuai dengan Renstra RSUD Kota Padang Panjang tahun 2013 – 2018 dengan Visi : *“Rumah Sakit yang Amanah”*

Demikian LKj IP RSUD Kota Padang Panjang tahun 2018 disusun dengan harapan komitmen bersama dalam pembangunan RSUD kedepan sangat dibutuhkan sehingga RSUD dapat lebih dikembangkan untuk mencapai Rumah Sakit dengan pelayanan yang berkualitas.

Padang Panjang, 18 Januari 2019
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Padang Panjang



dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009

KATA PENGANTAR

LKj IP RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini menggambarkan secara umum tentang bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD serta kewenangannya sebagai salah satu SKPD dibawah Pemerintahan Kota Padang Panjang.

LKj IP RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2018 tersusun secara sistematis yang disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan format yang diberikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan menyajikan indikator-indikator utama yang disaring dari Penetapan Kinerja RSUD Kota Padang Panjang, terutama menyangkut dengan pelaksanaan kinerja RSUD sebagaimana diamanatkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 tentang kesehatan.

Mudah-mudahan LKj IP RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini bermanfaat dalam Penyusunan LKj IP Kota Padang Panjang Tahun 2018. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat memenuhi maksud dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih.

DAFTAR ISI

IKTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Kedudukan, Tuga Pokok dan Fungsi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	5
1.4 Permasalahan Utama (Issue Strategis) yang dihadapi Organisasi	5
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Manusia	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Visi Misi	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	10
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2018	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2018	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran	18
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Bidang Kesehatan merupakan Visi dan Misi Kota Padang Panjang yang secara transparan dapat dilihat bagaimana Pemerintah Kota Padang Panjang beserta jajarannya berupaya selalu meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana di bidang kesehatan merupakan bukti tingginya Pemerintah Kota Padang Panjang untuk makin meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.

Rumah Sakit adalah bagian penting dari suatu sistem kesehatan, karena rumah sakit menyediakan pelayanan kuratif yang kompleks, berfungsi sebagai pusat rujukan, dan pelayanan gawat darurat serta merupakan pusat alih pengetahuan dan keahlian (teknologi). Kita harus sadar bahwa rumah sakit adalah institusi kesehatan yang padat modal, padat pakar dan padat teknologi. Dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana peralatan dan keuangan memungkinkan rumah sakit mempunyai daya guna yang lebih tinggi dari institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Secara historis RSUD Kota Padang Panjang bermula dari Poliklinik yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1940 yang beralamat di Jl. KH.A.Dahlan No.5 Kota Padang Panjang. Kemudian tahun 1943 Poliklinik tersebut di kuasai oleh Jepang. Tahun 1946 Poliklinik diambil alih oleh TNI sampai dengan tahun 1969. Pada tahun 1970 poliklinik diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dijadikan Rumah Sakit Umum. Tahun 1980 Rumah Sakit dijadikan sebagai rumah sakit kelas D, kemudian pada tanggal 12 November 1984 diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI dr.Suwardjono Surjaningrat sebagai rumah sakit kelas C dengan Direktur dr.Sulaiman berdasarkan SK Menkes RI No. 481/Menkes/SK/1997 dengan kapasitas tempat tidur 54 bh yang beralamat di Jl.K.H.Ahmad Dahlan No. 5 Kota Padang Panjang. Pada tahun 2007 RSUD pindah bangunan ke Jl.Tabek Gadang Kel. Ganting Kec.Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Pada tahun 2008 dengan SK Menkes RI No. 07.06/III/906/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan RSUD Kota Padang Panjang dengan nama RSUD Kota Padang Panjang merupakan RS kelas C dengan kapasitas tempat tidur 160 bh.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/434/WAKO-PP/2012 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang Tanggal 28 Desember 2012, maka sejak Bulan Januari 2013 RSUD Kota Padang Panjang menjadi BLUD.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang merupakan Rumah Sakit Type C yang terletak di posisi yang sangat strategis yaitu di persimpangan antara Kota Padang, Bukittinggi, Solok, dan Batusangkar. Rumah Sakit ini beralamat di Jalan Tabek Gadang Bukik Kandung Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, maka Fungsi Rumah Sakit adalah :

- a. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan;
- i. Penyelenggaraan pendataan, evaluasi, pelaporan dan rekam medik; dan
- j. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan sistem akuntansi;

Susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
 - a) Subag Umum dan Perlengkapan
 - b) Subag Kepegawaian
 - c) Subag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rekam Medik
- c. Bidang Pelayanan
 - a) Seksi Pelayanan Medis
 - b) Seksi Keperawatan
- d. Bidang Penunjang
 - a) Seksi Penunjang Medis
 - b) Seksi Penunjang Non Medis

- e. Bidang Keuangan
 - a) Seksi Perbendaharaan
 - b) Seksi Verifikasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a) Instalasi/Unit
 - 1) Rawat Jalan
 - 2) Rawat Inap
 - 3) Gawat Darurat
 - 4) Bedah Sentral
 - 5) Perawatan Intensif
 - 6) Radiologi/Rontgen
 - 7) Farmasi
 - 8) Gizi
 - 9) Laboratorium
 - 10) Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan
 - 11) Penyehatan Lingkungan
 - b) Komite Medis dan Staf Medis Fungsional

Tugas Pokok pada RSUD Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Direktur :

melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan.

2. Bagian Tata Usaha :

melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan RSUD.

A. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rekam Medik : menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pelayanan medis dan penunjang medis, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring, evaluasi, pembuatan laporan serta mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan rekam medik.

B. Sub Bagian Kepegawaian :

menyelenggarakan program kepegawaian dalam arti penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, disiplin, gaji berkala, cuti, kesejahteraan dan kehadiran PNSD dan Pegawai Honor.

C. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan :

menyelenggarakan program umum dan perlengkapan RSUD dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

3. Bidang Pelayanan :

melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang Pelayanan Medis.

A. Seksi Pelayanan Medis : menyelenggarakan program pelayanan medis dalam arti mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan medis, melakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari penerimaan hingga pemulangan pasien.

B. Seksi Keperawatan : menyelenggarakan program keperawatan dalam arti melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan.

4. Bidang Penunjang :

melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang penunjang pelayanan medis.

A. Seksi Penunjang Medis : menyelenggarakan program penunjang medis dalam arti melaksanakan koordinasi semua kebutuhan penunjang pelayanan medis dan melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis.

B. Seksi Penunjang Non Medis : menyelenggarakan program penunjang non medis dalam arti melaksanakan koordinasi semua kebutuhan pelayanan non medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis, kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta penyelenggaraan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan.

5. Bidang Keuangan :

melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang pengelolaan keuangan.

A. Seksi Perbendaharaan : mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program perbendaharaan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem perbendaharaan, pengelolaan pendapatan RSUD, menyiapkan anggaran kas dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di lingkungan RSUD.

B. Seksi Verifikasi : mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan sistem verifikasi keuangan daerah, menyelenggarakan pengujian tagihan dan permintaan pembayaran sistem akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD (laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca RSUD), menyajikan informasi keuangan, evaluasi keuangan, pembinaan sistem akuntansi keuangan, verifikasi anggaran belanja, anggaran penerimaan serta pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas RSUD

1.3. Aspek Strategis Organisasi

RSUD Kota Padang Panjang merupakan satu satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, mempunyai tenaga medis yang handal dan berdaya saing dengan gedung RSUD yang representative dan didukung oleh peralatan kesehatan dan kedokteran yang canggih

RSUD Kota Padang Panjang yang berada di daerah persimpangan, menjadi salah satu pilihan rujukan untuk wilayah yang berada di sekitar Padang Panjang, seperti daerah Kayu Tanam, Singgalang, Batipuh dan lainnya.

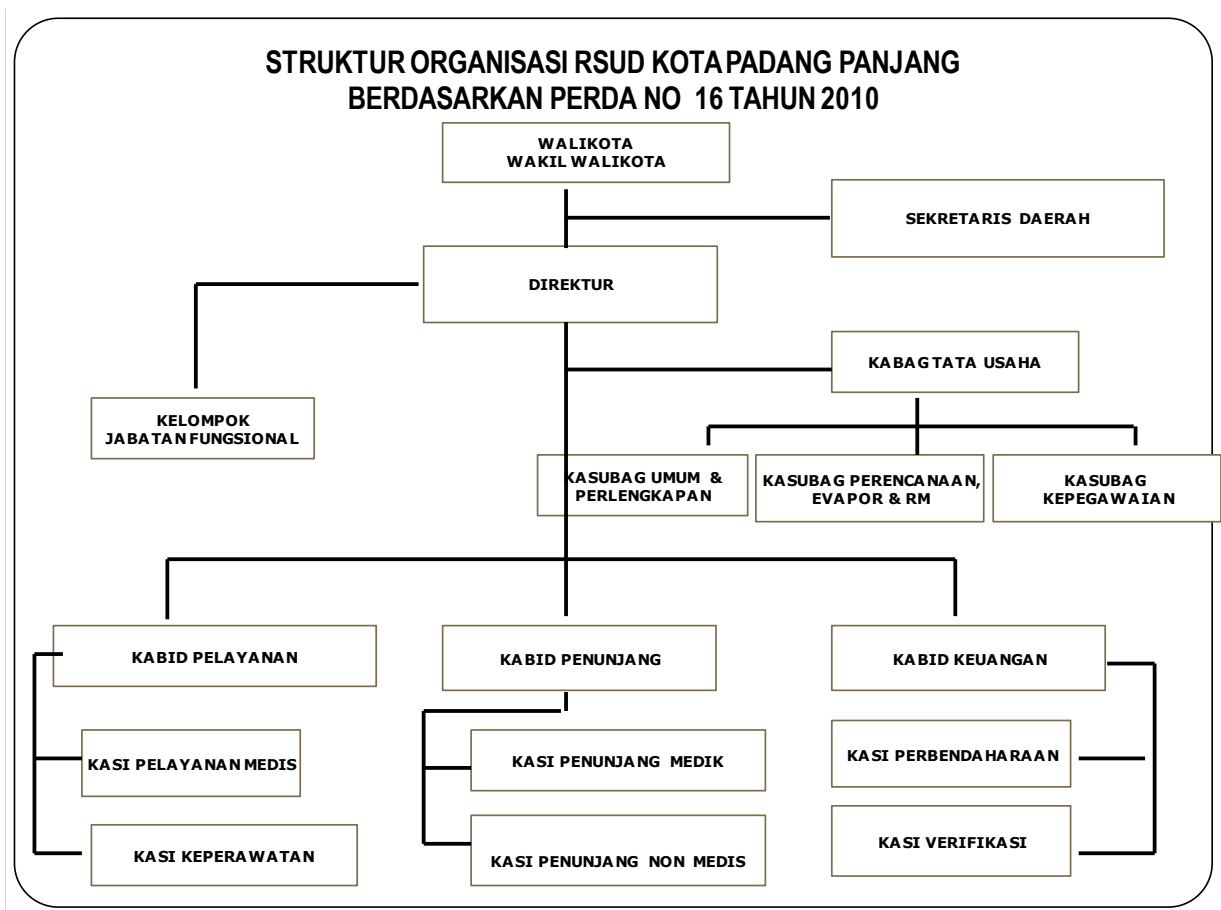
1.4. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, RSUD Kota Padang Panjang menyiapkan diri agar lebih professional dan berkualitas dengan mengoptimalkan sarana, prasarana dan pengembangan pelayanan serta SDM yang berkompetensi di bidangnya

Keterlambatan pembayaran klaim mengakibatkan lambatnya atau cenderung terhambatnya beberapa kegiatan di Rumah Sakit karena keterbatasan dana, contohnya terkuncinya pesanan obat karena hutang obat belum bisa dibayar.

Kebijakan kebijakan baru dari BPJS mengakibatkan kerugian kepada Rumah Sakit seperti penurunan-penurunan tarif pelayanan, kebijakan rujukan yang bertingkat bahwa, rujukan dari FKTP harus melalui Rumah Sakit type D kemudian dari Rumah Sakit Type D ke Rumah Sakit Type C dan seterusnya, hal ini akan mengakibatkan kurangnya kunjungan ke Rumah Sakit yang berdampak kepada turunnya pendapatan Rumah Sakit.

1.5. Stuktur Organisasi



1.6. Sumber Daya Manuasia

RSUD Kota Padang Panjang mempunyai 446 orang pegawai, dengan jumlah ASN 268 orang dan 178 orang tenaga PTT, tenaga Honorer dan tenaga Harian Lepas dengan uraian seperti dalam table berikut :

Tabel. 1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2018

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Eselon III	5	
2	Pejabat Eselon IV	6	
3	Dokter Spesialis	21	
4	Dokter Umum	7	2 tugas belajar
5	Dokter Gigi	2	
6	Perawat	114	
7	Bidan	15	
8	Psikolog klinis	1	
9	Apoteker	7	
10	Asisten Apoteker	22	
11	Perekam Medis	9	1 tugas belajar
12	Radiografer	5	
13	Pranata Laboratorium	11	
14	Fisioterapis	5	
15	Konseris	1	
16	Sanitarian	6	1 tugas belajar
17	Teknik Elektromedik	3	
18	Nutrisionis	8	
19	Fungsional Umum	20	
	Jumlah	268	

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Tidak Tetap PTT BLUD RSUD Kota Padang Panjang 2018

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dokter Umum	9	
2	Perawat	52	
3	Bidan	8	
4	Apoteker	3	
5	Asisten Apoteker	10	
6	Radiografer	1	
7	Petugas Laboratorium	1	
8	Fisioterapis	1	
9	Petugas UTDRS	5	
10	Staf Instalasi Kesehatan Lingkungan	3	
11	Staf CSSD	3	
12	Petugas Laundry	4	
13	Juru Masak	8	
14	Pramusaji	6	
15	Staf Rekam Medis	7	
16	Staf IPSRS	3	
17	Brankarman	6	
18	Karcis	5	
19	PPATRS	3	
20	Staf IPAM (gas Medis)	3	
21	Staf Sub Bagian Kepegawaian	1	
22	Staf Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	4	
23	Staf Bidang Keuangan	2	
24	Staf Verifikasi dan unit klaim	5	
25	Staf Bidang Pelayanan	1	
26	Staf Administrasi Bidang PELayanan	4	
27	Staf Bidang Penunjang	1	

28	Staf Administrasi Farmasi	1	
29	Satpam	8	
30	Sopir Ambulance	4	
31	Sopir Kantor/Manajemen	2	
32	Sopir Shuttle Bus	1	
	JUMLAH	175	
	HONORER		
1	Sopir Ambulance	1	
	JUMLAH	1	
	TENAGA HARIAN LEPAS		
1	IT Network	1	
2	IT Programmer	1	
	JUMLAH	2	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI - MISI

Sebagai sebuah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat RSUD Kota Padang Panjang memiliki visi dan misi sebagai berikut ;

VISI : “RUMAH SAKIT YANG AMANAH”

MISI :

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan SDM yang profesional, mandiri, adil dan humanis.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sesuai dengan kebutuhan.

2.2. TUJUAN dan SASARAN

2.2.1. Tujuan

Tercapainya RSUD Kota Padang Panjang menjadi tipe B tahun 2018

2.2.2. Sasaran

1. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit
2. Melengkapi Sarana dan Prasana Rumah Sakit
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

2.3. PENETAPAN KINERJA RSUD TAHUN 2018

Tabel 3.
Penetapan Kinerja RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM RSUD	Ketersediaan tenaga medis	46 orang	Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp. 1,619,900,000
		Jenis Pelayanan Spesialisasi	18 jenis	Kegiatan : Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Rp. 1,619,900,000
		Persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan	80%	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 4,885,495,000
				Kegiatan : 1. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Rp. 4,885,495,000
				- Belanja upah pegawai BLUD	Rp. 4,254,550,000
				- Belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 366,220,000
				- Belanja kegiatan kemitraan peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Rp. 264,725,000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD	Persentase ketersediaan alat kesehatan	100%	Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru	Rp. 6,042,000,000
				Kegiatan 1. DAK bidang kesehatan pelayanan rujukan	Rp. 6,042,000,000
				Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 1,311,180,000
				Kegiatan : 2. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Rp. 1,311,180,000

				- Belanja modal pengadaan alat kesehatan	Rp. 1,311,180,000
3	Peningkatan Mutu Pelayanan	SIM-RS terintegrasi	80%	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 597,350,000
				Kegiatan : 1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Rp. 597,350,000
				- Belanja kegiatan evaluasi akreditasi RS	Rp. 438,700,000
				- Honorarium tenaga ahli /instruktur/narasumber (Honor narasumber SIM-RS)	Rp. 18,000,000
				- Honorarium tenaga IT	Rp. 18,200,000
				- Belanja modal pengadaan rak server	Rp. 13,000,000
				- Pemeliharaan komputer	Rp. 93,250,000
				- Pemeliharaan printer	Rp. 16,200,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2018

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja selama tahun 2018 merupakan wujud dan kinerja secara menyeluruh dari RSUD Kota Padang Panjang dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam pencapaian kinerja RSUD Kota Padang Panjang juga mengacu kepada Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018 serta Rencana Strategi (RENSTRA) RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari SKPD.

Dalam tahun 2018 dana yang teralokasi pada RSUD Kota Padang Panjang untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan DAK (APBN), dengan rincian :

- Dana APBD : Rp. 54,238,707,873,-
- Dana DAK : Rp 6,042,000,000,-

Maka total penyelenggaraan kegiatan pada RSUD Kota Padang Panjang : Rp.60,280,707,873

Untuk pencapaian target Renstra RSUD Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 dapat kita lihat sebagai berikut :

3.1.1 Analisis Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Tabel 4.
Capaian Kinerja RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Ketersediaan tenaga medis	42 orang	46 orang	47 orang	102,17%
2.	Jenis pelayanan spesialisasi	17 jenis	18 jenis	18 jenis	100%
3.	Persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan	68%	80%	80%	100%
4.	Persentase ketersediaan alat kesehatan	90%	100%	100%	100%
5.	SIM RS terintegrasi	76%	80%	80%	100%

Pencapaian indikator kinerja tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Ketersediaan tenaga medis

Penambahan jumlah tenaga medis dari tahun 2017 ke tahun 2018 berjumlah sebanyak 4 orang, yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1 orang Dokter spesialis anastesi dari program nasional Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)

- 1 orang Dokter Spesialis anak yang baru tamat tugas belajar dan kembali mengabdikan di RSUD Kota Padang Panjang
 - Penerimaan 5 orang Dokter Umum PTT
 - Pemberhentian perpanjangan 2 orang Dokter PTT karena salah satu melanjutkan sekolah dan yang satunya lagi tidak diperpanjang
- b. Jenis pelayanan spesialisasi
- Realisasi jenis pelayanan pada tahun 2017 adalah 17 jenis dan realisasi jenis pelayanan pada tahun 2018 berjumlah 18 jenis, penambahan dari 2017 ke 2018 berjumlah 1 jenis pelayanan spesialisasi yaitu spesialisasi Patologi Anatomi
- c. Persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan
- Realisasi tahun 2017 adalah 68% dan realisasi pencapaian pada tahun 2018 adalah 80% dengan penambahan 12% sebagai berikut :
- Tenaga PTT :
- Apoteker 2 orang PTT
 - Asisten Apoteker 4 orang PTT
 - Tenaga IT 2 orang THL
- Tenaga PNS :
- Apoteker 1 orang
 - Tenaga analisis labor 1 orang
- d. Persentase ketersediaan alat kesehatan
- Realisasi alat kesehatan pada tahun 2018 adalah 100%, adapun pembelian alat alat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Pesawat X Ray | - Ophtalmoscope |
| - CR + Laser P | - Alat labor PA |
| - Stretcher | - Stetoskop |
| - Operating table | - Matras / Food trolley |
| - Operating lamp | - Keeler indirect |
| - Laser CO2 | - Bed Screen Triple s/s |
| - Trolley | |
| - Alat labor PA | |
| - CPAP transport | |
| - Patient Monitor | |

e. SIM RS Terintegrasi

Realisasi pencapaian pada tahun 2018 adalah 80%, penambahannya pada tahun ini adalah :

- Tenaga IT
- Bimbingan oleh tenaga ahli
- Pengadaan computer
- Pengadaan Jaringan
- Pengadaan Server

3.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

1. Adanya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan yang sangat membantu untuk pembayaran honor dokter referal dan honor dokter jaga, sehingga berpengaruh kepada penambahan jumlah dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang
2. Adanya kegiatan belanja upah pegawai BLUD pada sub kegiatan di program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD yang sangat membantu dalam peningkatan jumlah tenaga medis dan jumlah tenaga kesehatan lainnya.
3. Adanya Dokter Rumah Sakit Umum yang tamat sekolah tugas belajar dokter spesialis dan kembali ke Rumah Sakit umum Daerah Kota Padang Panjang sehingga menambah jumlah tenaga medis dan jumlah jenis pelayanan spesialisasi.
4. Adanya kerjasama yang baik dari lintas sektor dalam meningkatkan persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.
5. Adanya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata dengan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan melalui kegiatan DAK bidang pelayanan kesehatan rujukan dan belanja modal alat kesehatan di BLUD yang sangat membantu dalam peningkatan ketersediaan alat kesehatan
6. Adanya Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD yang mendukung kegiatan kegiatan seperti rekrut dan gaji tenaga IT, Pembayaran honorarium narasumber tenaga ahli untuk bimbingan tenaga IT, Pembelian computer, pemeliharaan computer dan pemeliharaan printer.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kualitas Kuantitas RSUD dan SDM	Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp. 1,619,900,000	Rp. 1,601,718,000	98,88
		Kegiatan : Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Rp. 1,619,900,000	Rp. 1,601,718,000	98,88
		Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			
		Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Rp. 4.885,495,000	Rp. 4,705,206,994	96,3
		- Belanja upah pegawai BLUD	Rp. 4,254,550,000	Rp. 4,253,450,000	99,97
		- Belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 366,220,000	Rp. 240,822,000	65,76
		- Belanja kegiatan kemitraan peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Rp. 264,725,000	Rp. 210,934,994	79,68
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD	Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			
		1. DAK bidang kesehatan pelayanan rujukan	Rp. 6,042,000,000	Rp. 5,694,665,240	94,25
		Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 1,277,235,180	Rp. 1,235,172,605	96,71
		1. Belanja modal pengadaan alat kesehatan	Rp. 1,277,235,180	Rp. 1,235,172,605	96,71
3	Peningkatan Mutu Pelayanan	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			
		Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Rp. 158,650,000	Rp. 149,748,000	94,38
		- Belanja kegiatan evaluasi akreditasi RS	Rp. 438,700,000	Rp. 412,152,081	93,95
		- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (Honorarium narasumber SIM RS)	Rp. 18,000,000	Rp. 18,000,000	100
		- Honorarium tenaga IT	Rp. 18,200,000	Rp. 15,050,000	82,69
		- Belanja modal pengadaan rak server	Rp. 13,000,000	Rp. 10,945,000	84,19
		- Pemeliharaan komputer	Rp. 93,250,000	Rp. 89,910,000	96,42
		- Pemeliharaan printer	Rp. 16,200,000	Rp. 15,843,000	97,80

Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100 %, disebabkan karena :

1. Sasaran “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM RSUD” pada Kegiatan Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan dengan pencairan 98,88%, hal ini disebabkan karena adanya honor dokter jaga yang berlebih disebabkan adanya beberapa perubahan jadwal
2. Sasaran “Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD” pada kegiatan DAK pelayanan kesehatan rujukan terealisasi sebanyak 94,25% hal ini disebabkan karena penyesuaian harga dengan e katalog
3. Sasaran “Peningkatan Mutu Pelayanan” pada kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan rata-rata tidak mencapai 100% karena penyesuaian harga saat pembelian

BAB IV PENUTUP

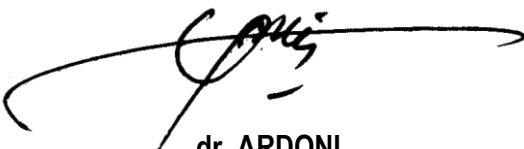
4.1 Kesimpulan

1. Sesuai dengan Visi RSUD Kota Padang Panjang yaitu Rumah Sakit Yang Amanah maka untuk mewujudkan hal tersebut RSUD harus meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan melengkapi sarana/prasarana.
2. LKj IP ini sangat perlu dalam pengambilan kebijakan pada kegiatan tahun berikutnya.
3. Penyusunan LKj IP ini merupakan evaluasi kuantitatif terhadap pelaksanaan APBD tahun 2018 yang dinilai melalui Indikator Kinerja Outcome.
4. Laporan ini sebagai bahan tolak ukur kinerja terhadap tercapainya Renstra RSUD Kota Padang Panjang.
5. Laporan LKj IP merupakan tolok ukur dan barometer kinerja pegawai maupun pimpinan SKPD dalam mengemban tugas yang diberikan sesuai dengan tupoksi.

4.2 Saran

1. Komitmen bersama sangat dibutuhkan sehingga RSUD dapat lebih dikembangkan untuk mencapai Rumah Sakit dengan pelayanan yang berkualitas.
2. LKj IP ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan penilaian akhir terhadap pelaksanaan program kegiatan OPD.
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kota Padang Panjang.
4. Perlu meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terutama pengelola kegiatan dan keuangan.
6. Dalam penyusunan anggaran benar-benar mengacu kepada visi, misi dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Padang Panjang, Januari 2019
DIREKTUR RUMAH SKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009